

ABSTRAK

Pengaruh *International Justice Mission* (IJM) dalam memerangi perdagangan manusia di Filipina, khususnya terkait kasus *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC), menggambarkan bagaimana peran aktor non-negara dapat menjadi elemen penting dalam tata kelola global. Filipina menonjol sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil mempertahankan peringkat TIER 1 dalam *Trafficking in Persons* (TIP) oleh Departemen Luar Negeri AS, suatu pencapaian yang terkait erat dengan keterlibatan IJM sebagai *International Non-Governmental Organization* (INGO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran IJM dalam mencapai dan mempertahankan status TIER 1 Filipina dengan memanfaatkan kerangka teori Organisasi Internasional dan Jaringan Advokasi Transnasional (*Transnational Advocacy Networks/TAN*). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dari sumber akademis, laporan organisasi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hipotesis penelitian ini menegaskan bahwa IJM memainkan peran penting melalui tiga mekanisme pengaruh TAN yaitu, pemingkasan isu dan penetapan agenda, pengaruh pada prosedur institusional, dan pengaruh perubahan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa IJM tidak hanya berfungsi sebagai mitra operasional pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan korban, tetapi juga bertindak sebagai aktor transnasional yang mendorong transformasi sistemik melalui pendekatan advokasi berlapis. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan INGO seperti IJM dapat memberikan legitimasi moral dan kapasitas teknis dalam membentuk respons negara terhadap isu perdagangan manusia, serta pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *International Justice Mission*, perdagangan manusia di Filipina, *Transnational Advocacy Network*

ABSTRACT

The International Justice Mission's (IJM) influence in combating human trafficking in the Philippines, particularly in the case of Online Sexual Exploitation of Children (OSEC), illustrates how the role of non-state actors can be a crucial element in global governance. The Philippines stands out as the only country in Southeast Asia to successfully maintain its TIER 1 ranking in Trafficking in Persons (TIP) by the US Department of State, an achievement closely linked to IJM's involvement as an International Non-Governmental Organization (INGO). This study aims to analyze IJM's role in achieving and maintaining the Philippines' TIER 1 status by utilizing the theoretical framework of International Organizations and Transnational Advocacy Networks (TAN). This study adopts a qualitative-descriptive approach, using data collection techniques through a literature review of academic sources, organizational reports, and relevant policy documents. The research hypothesis asserts that IJM plays a significant role through three TAN influence mechanisms: issue framing and agenda setting, influence on institutional procedures, and influence on policy change. The research findings show that IJM not only serves as an operational partner for the government in law enforcement and victim protection, but also acts as a transnational actor driving systemic transformation through a multi-layered advocacy approach. This research underscores that the involvement of INGOs like IJM can provide moral legitimacy and technical capacity in shaping the state's response to human trafficking issues, as well as the importance of cross-actor collaboration in creating inclusive and sustainable policies.

Keywords: *International Justice Mission, human trafficking in the Philippines, Transnational Advocacy Network*